

ABSTRAK

PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) DALAM MENANGANI PELANGGARAN ADMINISTRASI PILKADA TAHUN 2020 DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

Leo Adi Suseno

Pada Pilkada Bandar Lampung 2020, pelanggaran yang paling banyak ditemukan adalah pelanggaran administrasi dengan Jumlah pelanggaran 119 kasus. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi pada Pilkada Bandar Lampung 2020 melalui tinjauan sosiologi hukum dan kajian strukturalisme fungsional. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, Penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis, menginterpretasi, dan mendeskripsikan data yang diperoleh terkait peran bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi Pilkada 2020 di Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Peran Bawaslu dalam menanggapi pelanggaran administrasi terdapat pada tindakan yaitu temuan, rekomendasi, dan tindak lanjut rekomendasi; 2) Berdasarkan tinjauan sosiologi hukum, seluruh proses hukum yang terjadi dalam penanganan pelanggaran Pilkada Bandar Lampung 2020 telah sesuai dengan konsep-konsep sosiologi hukum yang terdiri atas a) hukum sebagai *social control*, b) hukum sebagai *social engineering*, c) efektivitas hukum dan peranan sanksi, dan d) kesadaran hukum dan kepatuhan hukum; serta 3) Berdasarkan konsep *Electoral Integrity*, Bawaslu telah menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif; 4) Berdasarkan tinjauan teori strukturalisme fungsional Robert K. Merton, Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan maksud *fungsi* yang diungkapkan oleh Robert K. Merton.

Kata Kunci: Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung 2020, Badan Pengawas Pemilu, Sosiologi Hukum, Strukturalisme fungsional

ABSTRACT

THE ROLE OF THE ELECTION SUPERVISORY AGENCY IN ADMINISTERING VIOLATIONS IN THE 2020 ELECTION ADMINISTRATION IN THE CITY OF BANDAR LAMPUNG

By

Leo Adi Suseno

In the 2020 Bandar Lampung regional head election, the most common violations found were administrative violations with a total of 119 violation cases. This research was conducted to describe the role of the election Supervisory Board in handling administrative violations in the 2020 Bandar Lampung regional head election through a review of the sociology of law and a study of functional structuralism. This research uses descriptive qualitative research. Qualitative descriptive research in this study is used to analyze, interpret, and describe the data obtained regarding the role of the election Supervisory Board in handling administrative violations for the 2020 regional head election in Bandar Lampung City. The results of the study show that 1) The role of the election Supervisory Board in dealing with administrative violations lies in actions, namely findings, recommendations and follow-up on recommendations; 2) Based on a review of the sociology of law, all legal processes that occur in handling violations in the 2020 Bandar Lampung regional head election are in accordance with the concepts of legal sociology which consist of a) law as social control, b) law as social engineering, c) legal effectiveness and the role of sanctions, and d) legal awareness and legal compliance; and 3) Based on the concept of Electoral Integrity, the election Supervisory Board has carried out legislative, executive and judicial functions; 4) Based on a review of Robert K. Merton's theory of functional structuralism, the election Supervisory Board in carrying out its duties and functions is in accordance with the purpose of the function expressed by Robert K. Merton..

Keywords: Bandar Lampung Regional Election 2020, Election Supervisory Board, Legal Sociology, Functional Structuralism